

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Amalia Citra Dewi

amaliacitradewi22@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the presentation on local financial statements and the accessibility on local financial statements to the transparency and accountability on local financial management at the Regional Device Work Unit (SKPD) in Surabaya. The population in this research was obtained by using purposive sampling method at the Regional Device Work Unit (SKPD) in Surabaya and based on predetermined criteria, the samples are obtained 29 SKPD. The analysis method used is multiple linear regression analysis with SPSS application tools (Statistical Product and Services Solutions) version 20.0. The results showed that accessibility of financial management has a positive influence with its significant level is 0.000 to the accountability of local financial management. While the presentation of financial statements negatively influence with its significant level is 0.032 to the accountability of local financial management. Simultaneously, the presentation of local financial statements and the accessibility of local financial reports have an influence on the accountability of local financial management.

Keywords: *presentation of financial statements, accessibility of financial statements, accountability of local financial management.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 29 SKPD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi 0,000 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif dengan tingkat signifikansi 0.032 terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan, penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

PENDAHULUAN

Isu akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik meningkatkan

partisipasi publik dalam pembangunan daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan demokratis di daerah (Mardiasmo, 2009). Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas di pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Penyajian laporan keuangan merupakan yang penting karena dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi, menilai dan memprediksi suatu kinerja instansi pemerintah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat.

Penyajian informasi keuangan pemerintah sesuai dengan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Rohman, 2009).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana, 2006). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Publikasi laporan keuangan dapat disampaikan melalui media seperti surat kabar, stasiun televisi, dan internet (*website*).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan (Halim, 2007). Dalam mencapai akuntabilitas

pengelolaan keuangan perlu dilakukan pengawasan oleh unit-unit pengawasan yang ada. Pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Laporan keuangan yang dapat dipercaya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode.

Dalam hal ini akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dapat diakses oleh publik. Masyarakat sebagai pihak pemberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Pemerintah Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Daerah Kota Surabaya selaku entitas pelaporan wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dan pertama kali dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi telah dipraktekan secara luas baik dalam sektor privat maupun sektor publik. Teori agensi muncul karena keberadaan hubungan antara agen (pihak yang menerima wewenang) dan prinsipal (pihak yang memberi wewenang). Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan masalah terjadinya ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibanding dengan prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dengan adanya *corporate governance* masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen dapat dimonitor dengan memperhatikan praktik *good corporate governance* adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Dilihat dari sudut pandang pemerintah, masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya (*self interest*) yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga kemampuan untuk membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari akuntabilitas. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah menggunakan basis akrual.

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian akan dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24 bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam satu periode.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (1) Relevan yang berarti laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang termuat dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan: (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), (b) Memiliki Manfaat Prediktif (*predictive value*), (c) Tepat Waktu, (d) Lengkap. (2) Andal yang berarti informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Setiap butir informasi yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi dapat dicegah. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: (a) Penyajian Jujur, (b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), (c) Netralitas, (d) Dapat Dibandingkan, (e) Dapat Dipahami.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Publik memiliki hak atas informasi keuangan sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik yang mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau

peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan, dan memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Pemerintah daerah harus memenuhi: (1) Keterbukaan yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan. (2) Kemudahan yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. (3) *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Menurut serikat dagang sektor publik GASB (1999) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1) Masyarakat, 2) Legislatif dan Badan Pengawasan, 3) Investor dan Kreditor.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Akuntabilitas menurut Mahmudi (2010) adalah Kewajiban *agent* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertical (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2009: 20). Pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada entitas otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009: 21).

Terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Elwood, 1993 dalam Mardiasmo, 2009) yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) yaitu akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran peyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*) yaitu akuntabilitas publik terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. (3) Akuntabilitas program (*program accountability*) yaitu akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. (4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yaitu akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD dan masyarakat luas.

Pemerintah daerah harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa penyajian pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat diartikan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka akan berimplikasi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

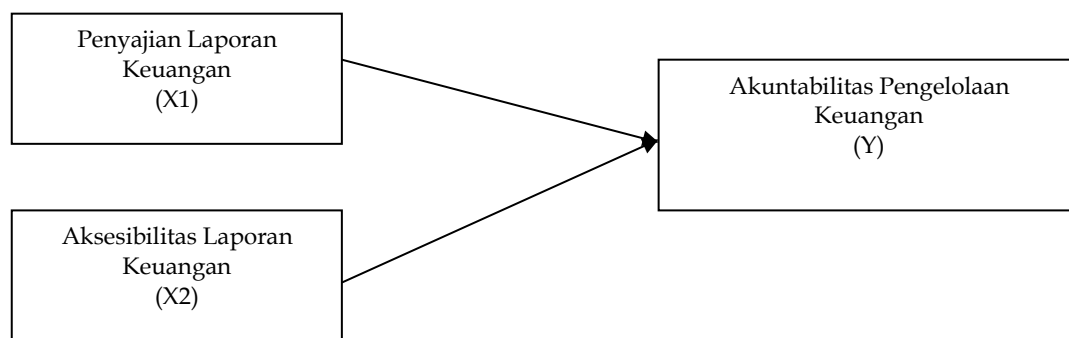
Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif, badan pengawas tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Semakin tinggi aksesibilitas atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Apabila pemerintah telah menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rerangka Konseptual

Adapun rerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan tergolong kausal (*causal research*). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Surabaya. Adapun kriteria atau pertimbangan yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan SKPD. Kriteria atau pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud adalah: (1) Kepala Dinas/Badan/Bagian SKPD di Kota Surabaya, (2) Staff pegawai bagian keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Data primer tersebut berupa kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan di 29 SKPD Kota Surabaya. Kuesioner yang disebar sebanyak 87 kuesioner. Penyebaran kuesioner didasarkan pada jumlah SKPD dikali dengan jumlah sampel yang terdiri dari 1 Kepala Dinas/Badan/Bagian di SKPD di Kota Surabaya dan 2 Staff pegawai bagian keuangan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Definisi Operasional Variabel

Penyajian Laporan Keuangan Daerah terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: (1) Relevan. (2) Andal. (3) Dapat dibandingkan. (4) Dapat dipahami. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah: (1) Keterbukaan. (2) Kemudahan. (3) *Accesible*. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*). (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*). (3) Akuntabilitas program (*program accountability*). (4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistic Product and Service Solution*).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat bagian pernyataan-pernyataan dalam bentuk skala *likert* untuk masing-masing variabel. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1
Distribusi Frekuensi
Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	Mean
1.	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan).	3,88
2.	SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu.	3,80
3.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	3,83
4.	Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.	3,86
5.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	3,76
6.	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur penyusunan anggaran tahun berikutnya.	3,73
7.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material.	3,77
8.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan.	3,96
Rata-rata secara keseluruhan		3,82

Sumber: Data primer diolah

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel 1 bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah sebagian besar responden menyatakan setuju pada pernyataan "Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan." dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu sebesar 3,96 Sedangkan secara keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) tanggapan responden terhadap seluruh aspek penyajian laporan keuangan daerah adalah sebesar 3,82. Dalam kelas interval termasuk dalam kategori 3,40-4,19 yang menunjukkan bahwa responden memberi nilai setuju atas pernyataan terhadap seluruh aspek penyajian laporan keuangan daerah.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi
Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	Mean
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.	4,07
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.	4,18
3.	Pengguna laporan keuangan dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>).	4,05
Rata-rata secara keseluruhan		4,10

Sumber: Data primer diolah

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel 2 bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagian besar responden menyatakan setuju pada pernyataan "Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah". Dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu sebesar 4,18. Sedangkan secara keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) tanggapan responden terhadap seluruh aspek penyajian laporan keuangan daerah adalah sebesar 4,10. Dalam kelas interval termasuk dalam kategori 3,40-4,19 yang menunjukkan bahwa responden memberi nilai setuju atas pernyataan terhadap seluruh aspek aksesibilitas laporan keuangan daerah.

Tabel 3
Distribusi Frekuensi
Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	Mean
1.	Pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.	4,10
2.	Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.	4,13
3.	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK.	4,12
Rata-rata secara keseluruhan		4,12

Sumber: Data primer diolah

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel 3 bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagian besar responden menyatakan setuju pada pernyataan "Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan." dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) tertinggi yaitu sebesar 4,13. Sedangkan secara keseluruhan nilai rata-rata (*mean*) tanggapan responden terhadap seluruh aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 4,12. Dalam kelas interval termasuk dalam kategori 3,40-4,19 yang menunjukkan bahwa responden memberi nilai setuju atas pernyataan terhadap seluruh aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel uji coba sebanyak 84 orang. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2 = 84-2 = 82$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, maka r tabel untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah **0.2164**. Berdasarkan pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	ItemPernyataan	Keterangan
PenyajianLaporanKeuangan Daerah	PLKD1	Valid
	PLKD2	Valid
	PLKD3	Valid
	PLKD4	Valid
	PLKD5	Valid
	PLKD6	Valid
	PLKD7	Valid
	PLKD8	Valid
Aksesibilitas LaporanKeuangan Daerah	ALKD1	Valid
	ALKD2	Valid
	ALKD3	Valid
AkuntabilitasPengelolaan KeuanganDaerah	APKD1	Valid
	APKD2	Valid
	APKD3	Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2164$).

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2006: 41) suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$, maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Keterangan
Penyajian LaporanKeuangan Daerah	Reliabel
Aksesibilitas LaporanKeuangan Daerah	Reliabel
Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Daerah	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel 5 yaitu dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 dengan menggunakan hasil perhitungan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	11,176	2,923		3,824	,000
	PLKD	-,372	,170	-,484	-2,187	,032
	ALKD	1,021	,221	1,022	4,615	,000

a. Dependent Variable: APKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 6, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

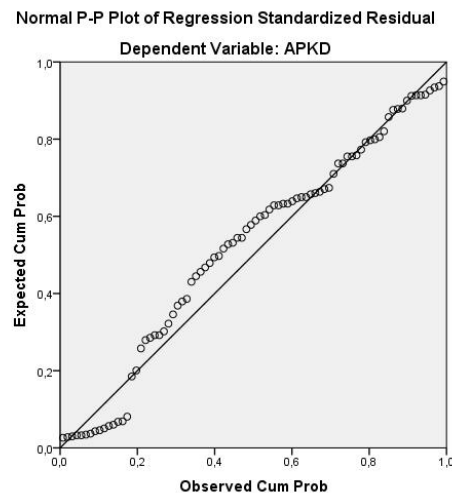
$$APKD = 11,176 + -0,372PLKD + 1,021ALKD + \varepsilon$$

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah. Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel independen memiliki koefisien bertanda negatif dan positif, penjelasan untuk persamaan tersebut adalah: (1) penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah artinya penyajian laporan keuangan daerah mendorong penurunan akuntabilitas pengelolaan keuangan. (2) aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah artinya aksesibilitas laporan keuangan daerah mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis normal seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada gambar 2 *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,85731954
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,100
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,924
Asymp. Sig. (2-tailed)		,361

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 7 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,361 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PLKD	,159	6,308
ALKD	,159	6,308

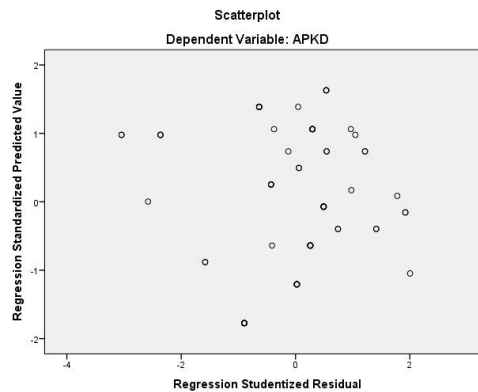
a. Dependent Variable: APKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui nilai *Tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL $> 0,10$ dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar 3 dari hasil SPSS berikut ini :



Gambar 3
Uji Heterokedastisitas
 Sumber: Data primer yang diolah

Dengan menggunakan metode grafik, menunjukkan penyebaran titik-titik data yaitu : (1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0. (2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. (3) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. (4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.609 ^a	.371	.355	1.509	.488

a. Predictors: (Constant), ALKD , PLKD

b. Dependent Variable: APKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel 9 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,371 atau 37,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 37,10% sedangkan sisanya 62,90% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Analisis regresi dengan menggunakan uji F dengan signifikansi 0,05. Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model. Hasil Uji F dapat dilihat dari tabel ANOVA (Ghozali, 2011:98). Apabila nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan dikatakan layak untuk digunakan pada penelitian. Sedangkan nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan dikatakan tidak layak untuk digunakan pada penelitian. Berikut perhitungan yang tersaji pada tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	108,603	2	54,302	23,855	,000 ^b
1 Residual	184,385	81	2,276		
Total	292,988	83			

a. Dependent Variable: APKD

b. Predictors: (Constant), ALKD , PLKD

Sumber: Data primer diolah

Uji t (T-test)

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Apabila signifikansi uji t < 0,05 maka H₀ ditolak, sedangkan apabila nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H₀ diterima. Berikut ini hasil uji t yang tersaji pada tabel 11:

Tabel 11
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	11,176	2,923		3,824	,000
1 PLKD	-,372	,170	-,484	-2,187	,032
ALKD	1,021	,221	1,022	4,615	,000

a. Dependent Variable: APKD

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel 11 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

(1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,032 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H₁) diterima. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan $0,000 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H₂) diterima.

PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Negatif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada tabel 11 ditemukan adanya pengaruh antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan menunjukkan arah yang negatif. Tingkat signifikansi variabel penyajian laporan keuangan daerah sebesar $0,032 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mustofa (2012), Sande (2015), dan Nurmutmainnah (2013) yang mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang dilakukan kurang baik, akan mendorong penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang tidak kompeten dalam bidang keuangan serta belum mumpuni untuk menyusun laporan keuangan sehingga penyajian laporan keuangan belum dilakukan dengan baik sehingga dapat mendorong penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada tabel 11 ditemukan adanya pengaruh antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan menunjukkan arah yang positif. Tingkat signifikansi variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012), Sande (2015), dan Nurmutmainnah (2013) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka akan mendorong peningkatan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Selain menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan daerah, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,032. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang kurang baik, maka akan mendorong penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Bagi penelitian selanjutnya mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi. (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden. (3) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain atau mengubah variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. BPFE. Yogyakarta.
- Erlina, O. S. Rambe., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 dan Pemendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Judika, F. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Universitas Sumatera Utara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi. Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mulyana, D. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. 2002. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurmutmainnah, W. 2015. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Konawe Utara.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya. Nomor 14 Tahun 2016 *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya*. Surabaya.
- _____. Nomor 20 Tahun 2014 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya. Nomor 32 Tahun 2014 *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya.
- Rohman, A. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sande, P. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1).
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba 4. Jakarta.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Edisi keenam. Tarsito. Bandung.

Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Moxed Methods)*. CV Alfabeta. Bandung. Walikota Surabaya. Peraturan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.